

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya tiap daerah yang ada pada Negara Indonesia ini sudah begitu besar dan juga pesat, hal ini sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal dan juga kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memprioritaskan kemampuan dan juga peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta pembangunan yang diupayakan untuk menjadi lebih baik. Pemerintah daerah perlu melaksanakan pengubahan susun belanja daerah, yang mulanya banyak dianggarkan demi kepentingan belanja rutin yang tidak begitu produktif, dengan melaksanakan alokasi belanja yang merujuk pendanaan untuk penyelenggaraan layanan umum pada masyarakat untuk beberapa sektor yang lainnya. Melalui peningkatan belanja daerah ini, dengan demikian diperlukan besaran dana yang tidak sedikit agar belanja daerah ini bisa tercukupi dan terwadahi (Fatimah, Anita dan Danang, 2019).

Dana pengalokasian pada belanja modal dipengaruhi dengan besaran penerimaan daerah yang berkaitan itu sendiri. Pihak pemerintah daerah mampu menaikkan penerimaan daerahnya tersebut dengan cara mengelola sumber daya daerah yang tersedia tersebut, yang mana bahwa ini kemudiakan akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang di masa depan digunakan sebagai satu dari beberapa sumber pendanaan belanja modal yang ada. Lebih

mendalam bahwa penerimaan daerah juga bersumberkan dari dana perimbangan, tidak sebataskan pada PAD. Apabila penerimaan PAD masih belum memenuhi belanja modal, maka pihak pemerintah daerah tersebut berharap bahwa dana transfer yang disediakan pihak pemerintah pusat itu dimaksudkan agar menutup alokasi dana belanja modal untuk tiap tahunnya tersebut. Untuk keadaan ini, dana perimbangan yang berperan sebagai penerimaan daerah ini kemudian dikirimkan pihak pemerintah pusat ini biasanya diperjadikan sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan semua aktivitas pemerintah daerah itu sendiri.

Dikutip dari Tribun Jogja (2017), pada tahun 2017 serapan anggaran di Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan juga Kabupaten Magelang ini dianggap tidak begitu tinggi. Sampai di bulan Desember 2017 pertengahan, penyerapan anggaran pada tiga daerah ini hanya berada pada titik 54 persen. Hal tersebut diakibatkan belanja modal yang masih rendah. Penyebab lain rendahnya capaian penyerapan yaitu terlambatnya penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM). Dikutip dari TRIBUN SOLO (2018), pada tahun 2018 serapan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada Kota Solo ini masih dianggap tidak tinggi. Tercatat serapan APBD Kota Solo baru mencapai 47 persen. Terdapat aktivitas organisasi dan juga perangkat daerah yang sudah berlangsung, akan tetapi anggaran ini masih belum dapat dilaksanakan pencairan. Artinya, angka serapan ini disebabkan bahwa pencairan yang dilaksanakan tersebut waktunya di akhir. Namun pada tahun 2020, terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat APBD pemerintah daerah di Indonesia perlu direvisi. Dikutip dari Berita Satu (2020), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Medan mengalami pengurangan hingga 40 persen pada tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19. Anggaran yang berkurang tersebut meliputi DAK, DAU, DBH dari Pemprov Sumut, serta PAD yang menurun. Anggaran yang ada saat ini akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan. Dikutip dari Antara News (2020), target pencapaian PAD Kota Surabaya tahun anggaran 2020 perlu direvisi akibat dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar kurang lebih tiga bulan, cukup memukul perekonomian di Surabaya sehingga menurunnya PAD yang diperkirakan mencapai 50 persen.

Dari permasalahan pada Tribun Jogja (2017), dan Tribun Solo (2018) pengalokasian APBD Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Hal ini memberikan pengaruh untuk penggunaan PAD yang masih dianggap tidak optimal, yang mana bahwa pemerintah daerah tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan yang bersumberkan dari pemerintah pusat yang berguna untuk melaksanakan pendanaan untuk semua pengeluaran daerahnya tersebut. Namun pada tahun 2020 terjadi kasus pandemi Covid-19 dunia. Hal tersebut mengakibatkan pergerakan ekonomi di Indonesia, terutama pada tiap provinsi menjadi bermasalah. Seperti yang terjadi pada Berita Satu (2020) dan Antara News (2020), pengalokasian APBD di tiap daerah perlu dilakukan revisi. Hal tersebut juga membuat PAD pada daerah mengalami penurunan karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19.

Menurut Juniawan & Suryantini (2018) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ini didefinisikan sebagai bagian pemasukan daerah

yang didapatkan atau bersumberkan dari sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri yang tidak mencangkup dengan dana perimbangan dan juga penerimaan yang lain sebagainya. Besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan alokasi belanja modal dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, jika PAD tersebut tinggi, hal ini akan memberikan pengaruh yang positif pada alokasi belanja modal tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi tersebut agar menciptakan infrastruktur dan memajukan daerahnya dengan mementingkan belanja modalnya. Berdasarkan penelitian Paramartha & Budiasih (2016) dan Aqnisa (2016), mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang positif pada belanja modal tersebut. Namun berbeda dengan penelitian Dwianto (2016), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah ini memberi pengaruh yang negatif pada belanja modal tersebut.

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai satu dari berbagai sumber pendapatan yang fundamental untuk suatu daerah tertentu itu sendiri. Di tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap provinsi memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya. PAD banyak di alokasikan ke belanja modal untuk peningkatan infrastruktur. Komponen yang berperan utama dalam peningkatan tersebut yaitu pajak daerah, kemudian di susul komponen lainnya seperti lain sebagainya yang sah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir retribusi daerah. Lalu pada awal tahun 2020, terjadi bencana pandemi Covid-19 yang membuat PAD pada tiap daerah mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada pajak hotel dan restoran karna hampir tidak ada pengunjung

hotel dan restoran. Hal tersebut karena diberlakukannya pembatasan sosial pada tiap daerah. Pengalokasian pada anggaran yang ada akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu pendapatan asli daerah pada belanja modal terlihat masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian pada belanja modal. Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kondisi ini akan menarik untuk dilakukan penelitian ulang terkait pada pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal sebelum serta sesudah pandemi Covid-19.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilaksanakan Paramartha & Budiasih (2016) yang berkaitan dengan pengaruh dari PAD pada Belanja Modal itu sendiri. Perbedaan yang ada ialah bahwa penelitian ini akan membandingkan bagaimana PAD berpengaruh pada Belanja Modal sesudah dan juga sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perbedaan lainnya ialah bahwa sampel penelitian yang diambil dari penelitiannya dengan penelitian terbaru juga berbeda yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015, sementara itu untuk penelitian terbaru menggunakan sampel Pemerintah Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian yang disajikan tersebut di atas, dengan ini penulis berkeinginan agar melaksanakan pengkajian untuk pendapatan asli daerah pada belanja modal yang ada. Dengan demikian judul yang diambil untuk penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap

Belanja Modal Dengan Pandemi Covid-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020”.

## 1.2 Masalah Penelitian

Dilihat dari fenomena dan *research gap* pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu belanja modal harus di peruntukan untuk infrastruktur dan apabila semua biaya yang digunakan untuk pembiayaan pandemi Covid-19 maka anggaran belanja modal akan rendah. Merujuk pada berbagai penelitian terdahulu, bahwa penelitian mendapatkan hasil yang tidak konsisten dan juga sesuai, dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan agar melaksanakan penelitian kembali berkenaan dengan PAD terhadap belanja modal dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.
2. Apakah pengaruh Covid-19 dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dan juga latar belakang penelitian ini yang diungkap tersebut di atas, oleh karena itu penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh Covid-19 dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Provinsi yang ada pada Negara Indonesia tahun 2019-2020.

#### 1.4 Manfaat Teoritis dan Praktis

Dari masalah dan tujuan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pihak Akademi

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangan kontribusi untuk pihak akademis untuk memahami dan memperluas pengetahuan tentang belanja modal selama pandemi Covid-19 berlangsung dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah provinsi

Hasil penelitian ini mampu menyediakan gambaran kepada pihak pemerintah provinsi yang ada di Negara Indonesia mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja modal untuk sesudah dan juga sebelum pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi peningkatan pelayanan publik di provinsi untuk sesudah dan juga sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.

- b. Bagi pihak Penulis

Hasil penelitian ini diekspektasikan mampu menyediakan wawasan dan juga pengetahuan tambahan berkenaan dengan pengaruh pendapatan asli

daerah pada belanja modal sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 dan dapat menjadi ajang bagi penulis guna mengaplikasikan di bidang akuntansi pemerintahan.

